SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.2097

MINAT POLITIK GENERASI MUDA DAN POLARISASI KONFLIK DIGITAL DI PROVINSI BANTEN: ANALISIS KUALITATIF BERBASIS SOCIAL NETWORK ANALYSIS

Youth Political Interest and Digital Conflict Polarization in Banten Province: A qualitative Study Based on Social Network Analysis

Lukman Hakim[1*]

Delila Putri Sadayi[2]

Zahra Aulia Mumtaz[3]

Andi Iksan[4]

*[1-4] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*email:
6670240016@student.untirta.ac.id,
Delila.putri@untirta.ac.id,
6670240159@student.untirta.ac.id,
6670240118@student.untirta.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Perubahan ruang digital telah membentuk pola baru sosialisasi politik generasi muda, termasuk di Provinsi Banten. Tingginya akses internet pemuda membuka peluang perluasan minat politik, tetapi pada saat yang sama menghadirkan risiko polarisasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik simbolik. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi antara minat politik generasi muda dan polarisasi konflik digital di Provinsi Banten melalui perspektif kualitatif berbasis *Social Network Analysis* (SNA). Metode penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan SNA interpretatif. Data diperoleh dari literatur akademik, dokumen resmi, dan sumber kelembagaan yang relevan, kemudian dianalisis melalui identifikasi node, klasifikasi relasi, penyusunan matriks jejaring, visualisasi sociogram konseptual, dan sintesis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat politik generasi muda dibentuk oleh jejaring akses informasi digital, media sosial, institusi kepemiluan, keluarga, sekolah/kampus, komunitas, dan aktor politik. Namun, jejaring yang sama dapat berubah menjadi arena polarisasi ketika dipengaruhi *selective exposure, algoritma platform, echo chamber*, kontestasi identitas, dan rendahnya literasi digital politik. Penelitian ini menegaskan bahwa ruang digital di Banten perlu dibaca sebagai arena partisipasi politik sekaligus ruang reproduksi konflik digital. Penguatan literasi digital politik, pendidikan pemilih berkelanjutan, serta kolaborasi antara lembaga pemilu, institusi pendidikan, komunitas, dan platform digital menjadi prasyarat penting untuk menjaga kualitas demokrasi lokal.

Kata Kunci:
Minat Politik; Generasi Muda; Polarisasi Digital

Keywords:
Political Interest; Youth; Digital Polarization

Abstract

The transformation of digital space has shaped new patterns of political socialization among young people, including in Banten Province. High internet access among youth creates opportunities to expand political interest, but at the same time introduces risks of polarization, misinformation, hate speech, and symbolic conflict. This study aims to analyze the relationship between youth political interest and digital conflict polarization in Banten Province through a qualitative perspective based on Social Network Analysis (SNA). The research method uses a descriptive qualitative design with an interpretive SNA approach. Data were obtained from academic literature, official documents, and relevant institutional sources, then analyzed through node identification, relationship classification, network matrix construction, conceptual sociogram visualization, and thematic synthesis. The findings show that youth political interest is shaped by digital information access networks, social media, electoral institutions, family, schools/universities, communities, and political actors. However, the same network can turn into a space of polarization when influenced by selective exposure, platform algorithms, echo chambers, identity contestation, and low levels of digital political literacy. This study emphasizes that the digital space in Banten should be understood both as a sphere of political participation and a space for reproducing digital conflict. Strengthening digital political literacy, continuous voter education, and collaboration between electoral institutions, educational institutions, communities, and digital platforms are essential prerequisites for maintaining the quality of local democracy.

Submit Tgl.: 18-Juni-2026	Diterima Tgl.: 21-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 25-Juni-2026

PENDAHULUAN

Perubahan sosial politik pada era digital tidak hanya ditandai oleh pergeseran medium komunikasi, tetapi juga oleh perubahan cara warga negara membangun orientasi politik, menilai isu publik, dan mengambil posisi dalam kontestasi demokrasi. Generasi muda berada pada posisi strategis dalam perubahan tersebut karena kelompok ini relatif intensif menggunakan media digital, mudah terpapar informasi politik, serta menjadi bagian penting dari basis pemilih dalam demokrasi elektoral. Dalam konteks ini, minat politik generasi muda menjadi fenomena penting karena kelompok ini paling intens berinteraksi dengan media digital dan paling cepat menyerap perubahan pola komunikasi publik. Sejumlah studi di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam mendorong partisipasi politik dan keterlibatan politik generasi muda (Stiawan and Dock 2025).

Provinsi Banten menjadi lokus yang relevan untuk membaca hubungan antara minat politik generasi muda dan polarisasi konflik digital. Data Statistik Pemuda Provinsi Banten 2024 menempatkan pemuda sebagai kelompok penting dalam data sosial daerah, mencakup aspek demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial ekonomi (Anon n.d.). Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas pemuda telah terhubung dengan teknologi informasi. Dalam dokumen yang digunakan pada penelitian awal, kepemilikan telepon seluler pemuda Banten mencapai 97,61%, sedangkan akses internet mencapai 96,95%. Akses yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena penting bagi pembentukan pengetahuan politik, preferensi elektoral, dan ekspresi sikap politik pemuda. Namun, tingginya akses digital tidak otomatis menghasilkan kualitas partisipasi politik yang sehat karena pengalaman digital juga dipengaruhi oleh kesenjangan literasi, algoritma platform, echo chamber, dan penyebaran konten bermuatan konflik.

Dari perspektif perubahan sosial politik, ruang digital menghadirkan dua kecenderungan yang berlangsung secara bersamaan. Di satu sisi, media sosial memperluas akses generasi muda terhadap informasi politik, membuka ruang diskusi publik, mempercepat penyebaran gagasan, dan memungkinkan keterlibatan politik yang lebih fleksibel. Di sisi lain, Sejumlah kajian menunjukkan bahwa media sosial juga dapat memperkuat *selective exposure*, *filter bubble*, dan pembelahan sikap politik. Studi tentang pengguna media sosial di Indonesia menemukan bahwa polarisasi politik bahkan dapat meluas ke isu non-elektoral, dan interaksi digital cenderung mengelompok di antara pengguna yang memiliki preferensi politik serupa (Ali 2021). Karena itu, minat politik generasi muda perlu dianalisis secara lebih hati-hati: minat politik dapat menjadi pintu masuk partisipasi demokratis, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk keterlibatan dalam konflik digital apabila tidak disertai literasi politik dan literasi digital yang memadai.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas partisipasi politik generasi muda, pengaruh media sosial terhadap political engagement, selective exposure, dan polarisasi politik digital. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung memisahkan minat politik sebagai gejala psikologis individu dari struktur jejaring digital yang membentuknya. Padahal, dalam realitas politik digital, minat politik tidak tumbuh dalam ruang kosong. Ia dibentuk oleh hubungan antara aktor, pesan, platform, institusi, komunitas, dan isu politik. Di sinilah pendekatan Social Network Analysis (SNA) menjadi penting, karena SNA memungkinkan peneliti melihat politik digital sebagai konfigurasi relasi, bukan sekadar kumpulan sikap individu.

Artikel awal kelompok telah memiliki fondasi penting berupa pembahasan minat politik generasi muda, selective exposure, network society, serta data konteks Banten. Namun, terdapat kelemahan metodologis yang perlu diperbaiki agar naskah lebih kuat untuk standar publikasi jurnal. Pertama, metode scoping review belum sepenuhnya menjawab permintaan pendekatan SNA karena belum menjelaskan node, edge, batas jejaring, dan cara interpretasi relasi. Kedua, hasil penelitian masih dominan berupa sintesis tematik sehingga relasi antaraktor belum terlihat secara eksplisit. Ketiga, klaim mengenai polarisasi perlu dijaga agar tidak melampaui data; misalnya, data risiko digital dari Bawaslu yang bersifat

nasional tidak boleh diposisikan sebagai angka spesifik Banten tanpa bukti tambahan. Oleh karena itu, artikel ini merevisi rancangan penelitian menjadi pendekatan kualitatif berbasis SNA interpretatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana jaringan aktor dan isu membentuk minat politik generasi muda di Provinsi Banten; bagaimana relasi digital tersebut berpotensi mendorong polarisasi konflik digital; serta bagaimana aktor kelembagaan dan komunitas dapat berperan sebagai jembatan untuk memperkuat literasi digital politik. Penelitian ini bertujuan memetakan relasi antara generasi muda, media sosial, institusi kepemiluan, aktor politik, komunitas, dan isu konflik digital dalam membentuk minat politik serta kerentanan polarisasi digital di Provinsi Banten.

Kontribusi artikel ini terletak pada penggunaan perspektif SNA secara kualitatif untuk membaca perubahan sosial politik generasi muda di ruang digital. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik atau menghitung metrik jaringan secara numerik karena data mentah media sosial tidak tersedia dalam dokumen penelitian awal. Sebaliknya, SNA digunakan sebagai lensa analitis untuk memetakan struktur relasi, mengidentifikasi aktor kunci secara konseptual, dan menafsirkan bagaimana aliran informasi politik dapat bergerak dari partisipasi menuju polarisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kualitas naskah akademik sekaligus memberi arah praktis bagi pendidikan pemilih, literasi digital politik, dan pencegahan konflik digital di tingkat lokal.

LANDASAN TEORI

Sosialisasi Politik dan Minat Politik Generasi Muda

Sosialisasi politik menjelaskan proses ketika individu memperoleh pengetahuan, nilai, orientasi, dan sikap politik melalui keluarga, sekolah, komunitas, media, pengalaman kewargaan, dan peristiwa politik. Dalam konteks generasi muda, sosialisasi politik bersifat dinamis karena berlangsung sepanjang kehidupan dan tidak hanya ditentukan oleh institusi formal. Muxel (2022) menempatkan sosialisasi politik sebagai proses yang menghubungkan pengalaman sosial dengan pembentukan orientasi politik. Wray-Lake (2019) juga menunjukkan bahwa keterlibatan politik kaum muda dapat tumbuh melalui komunitas, kesempatan mempraktikkan keterampilan politik, media sosial, dan peristiwa politik seperti pemilu.

Minat politik atau political interest merupakan salah satu dimensi awal keterlibatan politik. Larsen (2022) menjelaskan bahwa minat politik dipengaruhi oleh interaksi antara disposisi personal dan lingkungan politik. Dengan demikian, minat politik generasi muda di Banten tidak hanya muncul karena karakter individu, tetapi juga karena paparan isu, kampanye digital, percakapan di media sosial, lingkungan pendidikan, dan momentum elektoral. Minat politik dapat berkembang menjadi partisipasi, tetapi juga dapat berubah menjadi keterlibatan emosional yang rentan terhadap polarisasi ketika ruang informasi yang dikonsumsi bersifat homogen dan konfrontatif.

Network Society dan Perubahan Sosial Politik Digital

Network Society Theory dari Castells (2011) memandang masyarakat kontemporer sebagai struktur sosial yang semakin bergantung pada jaringan informasi. Dalam masyarakat jejaring, kekuasaan dan pengaruh tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga melalui arus informasi, konektivitas, simbol, dan kemampuan aktor untuk menghubungkan berbagai simpul komunikasi. Kerangka ini relevan untuk menganalisis politik digital karena media sosial mempercepat peredaran isu, memperluas ruang partisipasi, dan pada saat yang sama memperbesar peluang konflik simbolik.

Dalam konteks Banten, masyarakat jejaring tampak melalui keterhubungan pemuda dengan internet dan media sosial. Ruang digital menjadi tempat bertemunya informasi dari KPU, Bawaslu, aktor politik, media, komunitas, keluarga,

sekolah, dan sesama pengguna. Relasi tersebut dapat memperkuat minat politik apabila informasi yang beredar bersifat edukatif dan dialogis. Namun, relasi yang sama dapat memperkuat polarisasi apabila informasi yang beredar cenderung menyerang, tidak terverifikasi, atau hanya mempertemukan pengguna dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa.

Selective Exposure, Echo Chamber, dan Polarisasi Digital

Selective exposure merujuk pada kecenderungan individu memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan atau preferensi politiknya. Stroud (2010) menunjukkan bahwa selective exposure berkaitan dengan polarisasi karena pengguna media cenderung mengonsumsi sumber yang memperkuat posisi politiknya sendiri. Dalam ruang digital, selective exposure dapat diperkuat oleh algoritma platform, jejaring pertemanan, dan praktik berbagi konten di dalam kelompok sehaluan.

Echo chamber merupakan kondisi ketika pengguna lebih sering berinteraksi dengan informasi dan komunitas yang mengafirmasi pandangan mereka sendiri. Sunstein (2018) menjelaskan bahwa ruang informasi yang tertutup dapat membuat opini menjadi lebih ekstrem karena perjumpaan dengan pandangan berbeda semakin berkurang. Dalam konteks generasi muda, situasi ini penting karena minat politik yang meningkat dapat berubah menjadi polarisasi apabila pengguna hanya menerima informasi yang mendukung identitas politik tertentu dan menolak informasi dari kelompok lain.

Social Network Analysis sebagai Pendekatan Analisis

Social Network Analysis (SNA) merupakan pendekatan untuk memahami hubungan antaraktor dalam suatu jaringan sosial. Dalam materi pengantar SNA yang digunakan sebagai sumber metode, jejaring sosial dipahami sebagai pendekatan struktural untuk memahami interaksi sosial melalui aktor atau node dan relasi atau edges. Aktor dapat berupa individu, organisasi, halaman media sosial, isu, atau entitas lain, sedangkan edge menunjukkan hubungan, aliran informasi, komunikasi, interaksi, atau bentuk keterhubungan lain di antara aktor. SNA juga mengenal konsep pengukuran seperti degree centrality, indegree, outdegree, density, closeness, dan betweenness centrality.

Dalam penelitian ini, SNA digunakan secara kualitatif dan interpretatif. Artinya, penelitian tidak menghitung metrik jaringan secara numerik, melainkan menggunakan konsep node, edge, cluster, bridge, dan centrality sebagai perangkat untuk membaca pola relasi. Pendekatan ini dipilih karena data mentah media sosial yang memadai untuk perhitungan statistik jaringan belum tersedia. Dengan demikian, hasil penelitian berupa pemetaan konseptual relasi antaraktor dan isu, bukan klaim kuantitatif mengenai siapa aktor paling sentral berdasarkan data scraping media sosial.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep SNA dalam Penelitian

Konsep SNA	Makna dalam penelitian ini	Contoh operasional
Node	Aktor, institusi, kelompok, platform, atau isu yang menjadi simpul dalam jejaring politik digital.	Generasi muda, media sosial, KPU Banten, Bawaslu, aktor politik, sekolah/kampus, komunitas, disinformasi.
Edge	Relasi atau aliran hubungan antarsimpul.	Aliran informasi, pendidikan pemilih, kampanye digital, penyebaran konten, koreksi hoaks, konflik simbolik.
Cluster	Kelompok simpul yang cenderung saling terhubung kuat.	Kelompok pengguna sehaluan, komunitas pemilih muda, jejaring kampanye, jejaring literasi digital.
Bridge	Aktor atau simpul yang menghubungkan kelompok yang berbeda.	KPU, Bawaslu, sekolah/kampus, komunitas literasi, tokoh pemuda.
Centrality	Derajat pengaruh konseptual suatu	Media sosial sebagai medium

	simpul dalam menghubungkan informasi dan aktor.	dominan; lembaga pemilu sebagai sumber edukasi; aktor politik sebagai produsen isu.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan konsep SNA dan kebutuhan analisis penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami makna, pola relasi, dan dinamika sosial-politik di balik pembentukan minat politik generasi muda serta kerentanan polarisasi konflik digital. Sementara itu, pendekatan SNA digunakan untuk memetakan hubungan antaraktor, platform, isu, dan institusi yang membentuk jejaring politik digital di Provinsi Banten.

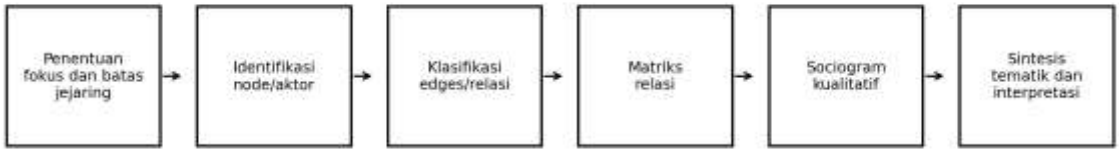
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku, laporan resmi, publikasi lembaga negara, serta informasi kelembagaan yang relevan dengan minat politik generasi muda, media sosial, polarisasi digital, kepemiluan, dan konteks Provinsi Banten. Sumber utama konteks lokal berasal dari dokumen tentang Statistik Pemuda Provinsi Banten 2024, informasi KPU Banten terkait pemilih pemula dan pendidikan pemilih, serta informasi Bawaslu tentang risiko digital pemilu. Literatur akademik digunakan untuk membangun landasan teoritis mengenai political socialization, political interest, selective exposure, network society, dan SNA.

Unit analisis penelitian ini adalah relasi dalam jejaring politik digital, bukan individu pemuda sebagai responden survei. Dalam kerangka SNA, node penelitian meliputi generasi muda/pemilih pemula, media sosial, KPU Banten, Bawaslu, sekolah atau kampus, keluarga dan komunitas, aktor politik, konten politik, algoritma platform, disinformasi dan ujaran kebencian, literasi digital politik, partisipasi politik, serta polarisasi konflik digital. Edges dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan atau aliran informasi, pendidikan pemilih, kampanye politik, interaksi digital, paparan konten, penyebaran risiko digital, serta upaya mitigasi melalui literasi digital politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi literatur. Tahap pertama adalah menentukan batas jejaring, yaitu jejaring politik digital generasi muda di Provinsi Banten. Tahap kedua adalah mengidentifikasi node berdasarkan aktor dan isu yang muncul dalam literatur serta dokumen resmi. Tahap ketiga adalah mengklasifikasikan edge berdasarkan bentuk relasi, seperti relasi informatif, edukatif, mobilisasi, konflik, dan mitigasi. Tahap keempat adalah menyusun matriks relasi untuk melihat keterhubungan antarsimpul. Tahap kelima adalah membuat sociogram konseptual untuk memvisualisasikan pola hubungan. Tahap keenam adalah melakukan sintesis tematik untuk menafsirkan hubungan antara minat politik dan polarisasi konflik digital.

Analisis data menggabungkan model analisis kualitatif dengan logika SNA. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan node, edge, dan tema penelitian. Penyajian data dilakukan melalui tabel operasional, matriks relasi, dan sociogram konseptual. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membaca pola hubungan antarsimpul, posisi aktor penghubung, potensi cluster, serta kecenderungan relasi yang mendorong partisipasi atau polarisasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, evaluasi kredibilitas dokumen, kesesuaian antara klaim dan bukti, serta kehati-hatian dalam membedakan data Banten-spesifik dan data nasional sebagai konteks pendukung.

Keterbatasan penelitian ini perlu ditegaskan agar klaim metodologis tetap proporsional. Penelitian ini belum menggunakan data scraping media sosial, survei jaringan, atau wawancara sosiometrik, sehingga tidak menghitung centrality, density, atau betweenness secara numerik. Oleh sebab itu, istilah SNA dalam penelitian ini digunakan sebagai pendekatan kualitatif untuk memetakan dan menafsirkan relasi, bukan sebagai analisis statistik jaringan penuh. Keterbatasan ini sekaligus menjadi rekomendasi bagi penelitian lanjutan agar menggunakan data digital empiris dan perangkat seperti Gephi, Kumu, Pajek, atau UCINet untuk memperoleh hasil jaringan yang lebih terukur.



Gambar 1. *Alur Analisis Kualitatif Berbasis SNA*

Sumber: Diilustrasikan penulis (2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Digital Pemuda Banten sebagai Arena Sosialisasi Politik

Konteks digital di Provinsi Banten menunjukkan bahwa generasi muda telah berada dalam lingkungan komunikasi yang sangat terkoneksi. Data yang digunakan dalam artikel awal menunjukkan bahwa kepemilikan telepon seluler pemuda Banten mencapai 97,61% dan akses internet mencapai 96,95%. Akses internet pemuda perkotaan mencapai 97,62%, sedangkan perdesaan mencapai 93,99%. Namun, terdapat kesenjangan yang lebih tajam pada akses komputer atau laptop, yaitu 30,18% di perkotaan dan 8,38% di perdesaan. Data tersebut memperlihatkan dua hal penting. Pertama, ruang digital telah menjadi arena utama pembentukan minat politik pemuda. Kedua, kualitas akses digital tidak sepenuhnya merata sehingga pengalaman politik digital pemuda dapat berbeda berdasarkan wilayah dan perangkat yang dimiliki.

Dalam perspektif sosialisasi politik, akses digital memperluas sumber pembelajaran politik generasi muda. Pemuda tidak hanya memperoleh informasi dari keluarga, sekolah, atau organisasi formal, tetapi juga dari media sosial, influencer, akun lembaga, percakapan komunitas, dan konten yang dipilih algoritma platform. Kondisi ini membuat sosialisasi politik menjadi lebih cair, cepat, dan terfragmentasi. Informasi politik dapat hadir dalam bentuk berita, video pendek, meme, komentar, siaran langsung, kampanye digital, hingga perdebatan antarpendukung politik. Dengan demikian, minat politik pemuda tumbuh melalui jejaring informasi yang terus bergerak dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh institusi formal.

Tabel 2. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemuda di Provinsi Banten 2024

Indikator	Total (%)	Perkotaan (%)	Perdesaan (%)	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Implikasi Analitis
Memiliki telepon seluler	97,61	98,19	95,05	97,62	97,60	Ponsel menjadi pintu masuk utama informasi politik digital.
Akses internet	96,95	97,62	93,99	97,14	96,75	Ruang digital relevan sebagai arena sosialisasi politik pemuda.
Akses komputer/laptop	-	30,18	8,38	23,12	29,19	Kesenjangan perangkat dapat memengaruhi kualitas akses dan produksi konten politik.

Sumber: BPS Provinsi Banten, Statistik Pemuda Provinsi Banten 2024 (Susenas Maret 2024).

Pemetaan Node dan Edge dalam Jejaring Politik Digital Pemuda

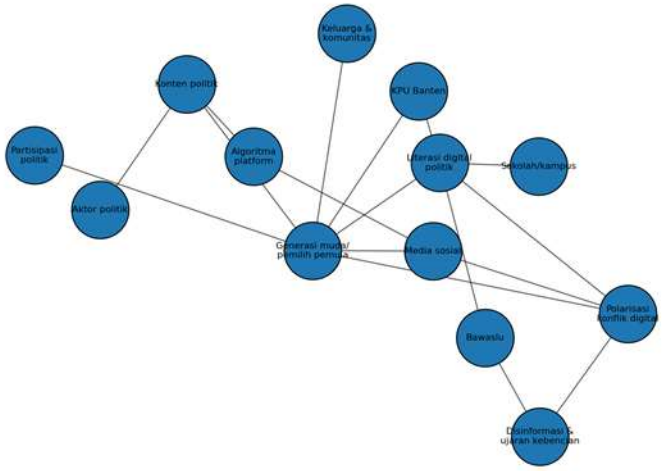
Pendekatan SNA membantu memperjelas bahwa minat politik generasi muda tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh jaringan aktor dan isu. Dalam penelitian ini, generasi muda ditempatkan sebagai node utama yang menerima, menafsirkan, dan memproduksi informasi politik. Media sosial berfungsi sebagai medium penghubung yang mempertemukan generasi muda dengan aktor politik, institusi kepemiluan, keluarga, komunitas, sekolah/kampus, serta konten politik. KPU Banten dan Bawaslu berperan sebagai node kelembagaan yang berpotensi menjadi sumber pendidikan pemilih, literasi digital, dan mitigasi risiko politik digital. Sementara itu, aktor politik dan konten politik dapat mendorong minat politik, tetapi juga berpotensi memperkuat pembelahan apabila narasi yang disebarkan bersifat menyerang atau identitarian (Ali 2021).

Edge dalam jejaring ini tidak hanya berupa komunikasi langsung, tetapi juga dapat berupa paparan konten, aliran informasi, interaksi komentar, ajakan partisipasi, edukasi pemilih, penyebaran hoaks, dan koreksi informasi. Dengan membaca edge, peneliti dapat melihat bagaimana suatu relasi mendorong partisipasi atau justru memperkuat polarisasi. Misalnya, relasi antara KPU Banten dan generasi muda melalui konten pendidikan pemilih cenderung bersifat edukatif. Sebaliknya, relasi antara disinformasi/ujaran kebencian dan generasi muda melalui media sosial cenderung meningkatkan risiko konflik digital. Relasi literasi digital politik terhadap generasi muda berfungsi sebagai mitigasi karena membantu pemuda memilah informasi, memverifikasi sumber, dan menghindari respons emosional terhadap konten provokatif (Metodologi and Syukron n.d.).

Tabel 3. Matriks Relasi Jejaring Politik Digital Pemuda Banten

Node Sumber	Node Tujuan	Jenis Edge	Makna SNA Kualitatif
Media sosial	Generasi muda/pemilih pemula	Paparan informasi	Media sosial menjadi jalur utama konsumsi isu politik.
KPU Banten	Generasi muda/pemilih pemula	Pendidikan pemilih	Institusi pemilu dapat menjadi bridge antara demokrasi formal dan pemilih muda.
Bawaslu	Literasi digital politik	Pengawasan dan edukasi	Bawaslu berperan dalam mitigasi hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.
Aktor politik	Konten politik	Produksi narasi	Aktor politik membentuk isu dan pesan yang dikonsumsi pemuda.
Algoritma platform	Konten politik	Kurasi dan rekomendasi	Algoritma dapat memperkuat echo chamber dan selective exposure.
Disinformasi/ujaran kebencian	Polarisasi konflik digital	Konflik simbolik	Konten bermuatan kebencian berpotensi memperkeras pembelahan sosial-politik.
Sekolah/kampus/komunitas	Literasi digital politik	Pembelajaran kritis	Institusi sosial dapat memperkuat kemampuan verifikasi dan dialog demokratis.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan sintesis literatur dan dokumen penelitian (Ali & Eriyanto, 2021; Stroud, 2010; Sunstein, 2018; Castells, 2011; Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, 2025; Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025; Muh Syukron, 2026).



Gambar 2. Sociogram Kualitatif Relasi Minat Politik dan Polarisasi Konflik Digital

Jejaring Pembentuk Minat Politik Generasi Muda

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa minat politik generasi muda di Banten terutama dibentuk oleh keterhubungan antara media sosial, konten politik, momentum elektoral, institusi pendidikan, keluarga/komunitas, dan lembaga kepemiluan. Media sosial memiliki posisi penting karena ruang digital memungkinkan generasi muda memperoleh informasi politik, mengekspresikan pendapat, dan terlibat dalam diskusi publik melalui berbagai platform digital (Saud & Margono, 2021; Stiawan & Dock, 2025). KPU Banten dapat mengisi ruang ini dengan pendidikan pemilih, informasi kepemiluan, dan kampanye partisipasi yang dikemas sesuai karakter pemilih muda. Sekolah dan kampus juga berperan penting karena dapat memberi landasan berpikir kritis, sedangkan keluarga dan komunitas memengaruhi orientasi nilai dan kepercayaan politik sehari-hari (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, 2025). Keterlibatan politik kaum muda dapat tumbuh melalui komunitas, pengalaman sehari-hari, kesempatan mempraktikkan keterampilan politik, media sosial, dan peristiwa politik seperti pemilu (Muxel, 2022; Wray-Lake, 2019)

Dalam perspektif SNA, media sosial dapat dipahami sebagai simpul penghubung dengan derajat keterhubungan tinggi karena menghubungkan generasi muda dengan banyak sumber informasi. Namun, media sosial bukan aktor netral. Platform memiliki logika algoritmik yang mengatur visibilitas konten. Konten yang banyak memicu respons emosional sering kali lebih mudah beredar daripada konten edukatif yang membutuhkan pembacaan kritis. Karena itu, minat politik yang tumbuh dari media sosial dapat bersifat dangkal apabila hanya dibentuk oleh sensasi, viralitas, atau afiliasi kelompok, bukan oleh pemahaman substansi isu.

Di sisi lain, momentum elektoral dapat menjadi pemicu meningkatnya political interest. Kampanye, debat kandidat, isu kebijakan, dan percakapan publik membuat politik lebih hadir dalam keseharian pemuda. Namun, pertumbuhan minat politik yang sehat membutuhkan mediator literasi (Larsen, 2022). Tanpa mediator tersebut, peningkatan paparan informasi dapat berubah menjadi kelelahan informasi, sinisme politik, atau keterlibatan emosional yang mudah diprovokasi. Karena itu, keberadaan node penghubung seperti KPU, Bawaslu, sekolah/kampus, komunitas pemuda, dan media kredibel menjadi penting untuk memastikan bahwa minat politik berkembang menjadi partisipasi demokratis, bukan polarisasi.

Namun, pertumbuhan minat politik yang sehat membutuhkan mediator literasi. Tanpa mediator tersebut, peningkatan paparan informasi dapat berubah menjadi kelelahan informasi, sinisme politik, atau keterlibatan emosional yang mudah diprovokasi. Karena itu, keberadaan node penghubung seperti KPU, Bawaslu, sekolah/kampus, komunitas pemuda, dan media kredibel menjadi penting untuk memastikan bahwa minat politik berkembang menjadi partisipasi demokratis, bukan polarisasi (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023; Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, 2025).

Dari Minat Politik Menuju Polarisasi Konflik Digital

Peningkatan minat politik generasi muda tidak selalu bergerak secara linear menuju partisipasi demokratis yang sehat. Temuan teoritis tentang selective exposure menunjukkan bahwa individu cenderung memilih informasi yang sesuai dengan sikap politiknya. Dalam jejaring digital, kecenderungan ini dapat berubah menjadi echo chamber karena algoritma platform, jejaring pertemanan, dan kebiasaan berbagi konten membuat pengguna lebih sering bertemu dengan pandangan serupa. Ketika perjumpaan dengan pandangan berbeda semakin berkurang, diskusi politik cenderung berubah menjadi penegasan identitas kelompok.

Polarisasi konflik digital muncul ketika perbedaan politik tidak lagi dipahami sebagai perbedaan gagasan, tetapi sebagai pertentangan identitas antara "kita" dan "mereka" (Ali & Eriyanto, 2021). Dalam situasi seperti ini, konten politik yang menyerang lawan, menyebarkan stereotip, atau memproduksi kecurigaan dapat memperoleh tempat lebih besar. Generasi muda yang semula tertarik pada politik dapat terdorong masuk ke dalam perdebatan yang emosional dan konfliktual. Dengan kata lain, minat politik menjadi rawan bergeser menjadi polarisasi ketika jaringan informasi yang dikonsumsi tertutup, homogen, dan minim verifikasi (Castells, 2011).

Data Bawaslu tentang dominasi ujaran kebencian dalam pengawasan siber Pemilu 2024 memberikan konteks bahwa risiko konflik digital merupakan persoalan nyata dalam demokrasi Indonesia. Namun, secara metodologis, angka tersebut perlu dibaca sebagai konteks nasional, bukan klaim spesifik Banten apabila tidak tersedia data daerah yang eksplisit. Kehati-hatian ini penting untuk menjaga kualitas akademik artikel. Dalam kerangka SNA, data tersebut menguatkan argumen bahwa node disinformasi dan ujaran kebencian perlu diperhitungkan dalam jejaring politik digital karena simpul ini dapat memperkuat edge konflik dan mendorong cluster polarisasi (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023; Muh Syukron, 2026).

Tabel 4. Pola Relasi SNA Kualitatif: Dari Partisipasi Menuju Polarisasi

Pola Relasi	Kondisi yang Mendorong	Dampak terhadap Generasi Muda	Strategi Mitigasi
Relasi edukatif	Konten terverifikasi, pendidikan pemilih, literasi digital politik	Minat politik berkembang menjadi pengetahuan dan partisipasi	Kolaborasi KPU, Bawaslu, sekolah/kampus, komunitas pemuda
Relasi mobilisasi	Kampanye digital, ajakan memilih, narasi isu publik	Pemuda terdorong ikut berdiskusi atau berpartisipasi	Transparansi pesan dan etika kampanye digital
Relasi homogen	Selective exposure, algoritma, komunitas sehaluan	Opini menguat dalam kelompok sendiri	Paparan silang dan forum dialog lintas kelompok
Relasi konfliktual	Hoaks, ujaran kebencian, serangan identitas, disinformasi	Minat politik berubah menjadi polarisasi dan konflik simbolik	Verifikasi informasi, moderasi konten, respons cepat lembaga kredibel

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan landasan teori dan konteks penelitian

Aktor Penghubung dan Strategi Pencegahan Polarisasi

Dalam SNA, aktor penghubung atau *bridge* memiliki posisi penting karena dapat menghubungkan cluster yang berbeda (Borgatti et al., 2009; Freeman, 1979). Dalam penelitian ini, aktor penghubung tidak ditentukan melalui perhitungan betweenness centrality numerik, melainkan melalui interpretasi peran konseptual. KPU Banten, Bawaslu, sekolah/kampus, komunitas pemuda, media kredibel, dan tokoh lokal dapat berfungsi sebagai bridge karena mereka mampu menghubungkan ruang demokrasi formal dengan percakapan digital generasi muda (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, 2025; Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023; Muh Syukron, 2026). Peran ini penting untuk mencegah terbentuknya cluster politik yang tertutup dan saling bermusuhan.

KPU Banten dapat memperkuat pendidikan pemilih yang tidak hanya menjelaskan prosedur pemilu, tetapi juga membangun kemampuan pemilih muda untuk menilai program, mengecek informasi, dan memahami etika perbedaan politik (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, 2025). Bawaslu dapat memperluas literasi pengawasan partisipatif dengan memberi panduan praktis mengenai cara mengenali hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023). Sekolah dan kampus dapat menjadi ruang dialog yang melatih kemampuan berpikir kritis, sedangkan komunitas pemuda dapat menjembatani bahasa kelembagaan dengan gaya komunikasi generasi muda (Wray-Lake, 2019; Muxel, 2022).

Strategi pencegahan polarisasi tidak cukup dilakukan melalui kampanye normatif yang hanya mengajak pemuda "bijak bermedia sosial". Strategi yang lebih kuat perlu memahami struktur jejaring digital. Apabila polarisasi terbentuk karena cluster yang tertutup, maka intervensi harus membuka ruang dialog lintas kelompok. Apabila disinformasi menyebar melalui simpul tertentu, maka lembaga kredibel perlu hadir di jalur informasi yang sama. Apabila konten edukatif kalah oleh konten provokatif, maka pendidikan pemilih perlu dikemas secara lebih komunikatif, visual, dan mudah dibagikan. Dengan demikian, SNA membantu merancang strategi intervensi yang berbasis relasi, bukan sekadar berbasis pesan (Castells, 2011; Sunstein, 2018; Ali & Eriyanto, 2021).

Implikasi terhadap Mata Kuliah Perubahan Sosial Politik

Dari sudut pandang perubahan sosial politik, kasus minat politik generasi muda dan polarisasi konflik digital di Banten memperlihatkan bahwa perubahan politik kontemporer tidak hanya terjadi di lembaga negara atau arena pemilu formal. Perubahan juga terjadi dalam cara masyarakat menerima informasi, membentuk identitas politik, dan berinteraksi dengan kelompok berbeda (Castells, 2011; Stiawan & Dock, 2025). Ruang digital menggeser pola sosialisasi politik dari model hierarkis menuju model jejaring (Muxel, 2022; Wray-Lake, 2019). Akibatnya, otoritas informasi tidak lagi sepenuhnya berada pada negara, sekolah, keluarga, atau media arus utama, tetapi tersebar di berbagai simpul digital (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025).

Perubahan ini membawa konsekuensi demokratis. Generasi muda memiliki peluang lebih besar untuk belajar politik, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam isu publik. Namun, demokrasi digital juga menghadapi tantangan karena keterbukaan informasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian, memperbesar prasangka, dan memperkuat pembelahan (Stroud, 2010; Sunstein, 2018; Ali & Eriyanto, 2021). Oleh karena itu, kualitas perubahan sosial politik di era digital sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan institusi untuk mengubah konektivitas menjadi literasi, partisipasi menjadi dialog, dan perbedaan menjadi deliberasi demokratis (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023).

Dengan pendekatan SNA, perubahan sosial politik dapat dibaca melalui pola relasi. Ketika jaringan didominasi oleh relasi edukatif dan dialogis, minat politik pemuda dapat menjadi modal demokrasi. Sebaliknya, ketika jaringan didominasi

oleh relasi homogen dan konfliktual, minat politik dapat menjadi energi polarisasi (Borgatti et al., 2009; Freeman, 1979; Muh Syukron, 2026). Kerangka ini membantu mahasiswa memahami bahwa politik digital bukan hanya soal teknologi, tetapi soal struktur hubungan sosial yang menentukan arah perubahan demokrasi lokal (Castells, 2011; Sunstein, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa minat politik generasi muda di Provinsi Banten merupakan gejala perubahan sosial politik yang terbentuk melalui jejaring digital. Tingginya akses telepon seluler dan internet membuat ruang digital menjadi arena penting bagi sosialisasi politik pemuda. Dalam jejaring tersebut, media sosial, konten politik, institusi kepemiluan, sekolah/kampus, keluarga, komunitas, dan aktor politik saling terhubung dalam membentuk perhatian, pengetahuan, dan ekspresi politik generasi muda. Melalui pendekatan SNA kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa relasi digital dapat bergerak dalam dua arah. Pertama, relasi edukatif dan partisipatif dapat memperkuat political interest, literasi politik, dan keterlibatan demokratis. Kedua, relasi homogen dan konfliktual dapat mendorong selective exposure, echo chamber, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi konflik digital. Dengan demikian, minat politik tidak selalu berdampak positif secara otomatis; kualitasnya sangat bergantung pada struktur jejaring informasi yang membentuknya.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya aktor penghubung seperti KPU Banten, Bawaslu, sekolah/kampus, komunitas pemuda, media kredibel, dan tokoh lokal dalam mencegah polarisasi digital. Aktor-aktor tersebut perlu hadir sebagai bridge yang menghubungkan cluster berbeda, menyediakan informasi terverifikasi, serta membangun ruang dialog lintas pandangan. Secara praktis, diperlukan penguatan literasi digital politik, pendidikan pemilih berkelanjutan, pengawasan partisipatif, dan strategi komunikasi publik yang sesuai dengan karakter generasi muda.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan SNA secara kualitatif berbasis data sekunder, sehingga belum menghasilkan perhitungan metrik jaringan seperti *degree centrality, density,* atau *betweenness centrality*. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data empiris yang lebih kuat, seperti scraping percakapan media sosial, wawancara sosiometrik, netnografi, atau survei jejaring pemuda Banten. Dengan data tersebut, peta jaringan politik digital dapat dianalisis secara lebih terukur dan dapat memperlihatkan aktor, isu, serta cluster yang paling berpengaruh dalam membentuk minat politik maupun polarisasi konflik digital.

REFERENSI

Ali, D. J., & Eriyanto. (2021). Political polarization and selective exposure of social media users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24*(3), 268–283.

Anon. n.d. "Cover Depan."

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023, October 12). Tangkal informasi hoaks di media sosial, Bawaslu bangun literasi digital. Retrieved from https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tangkal-informasi-hoaks-di-media-sosial-bawaslu-bangun-literasi-digital

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025). Statistik Pemuda Provinsi Banten 2024. BPS Provinsi Banten.

Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J., & Labianca, G. (2009). Network analysis in the social sciences. *Science, 323*(5916), 892–895.

Castells, M. (2011). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks, 1*(3), 215–239.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. (2025, September 22). KPU Banten bidik pemilih pemula sebagai investasi peningkatan demokrasi. Retrieved from

Larsen, E. G. (2022). Dynamic political interest: How personality differences and the political environment shape political interest. *British Journal of Political Science, 52*(1), 467–474.

Metodologi, Kelas, and Muh Syukron. n.d. "Social Network Analysis (SNA): Sebuah Pengantar."

Muxel, A. (2022). Political socialization and political participation. In M. Giugni & M. Grasso (Eds.), *The Oxford handbook of political participation* (pp. 687–702). Oxford University Press.

Muh Syukron. (2026). *Pengantar Social Network Analysis (SNA)* [PDF]. Universitas/Modul Pengantar SNA.

Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics, 18*(4), 443–454.

Stiawan, Agung, and Chanthoeurn Dock. 2025. "International Journal of Geography , Social , and Multicultural Education." 3(2):46–58.

Stroud, N. J. (2010). Polarization and partisan selective exposure. *Journal of Communication, 60*(3), 556–576.

Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Wray-Lake, L. (2019). How do young people become politically engaged? *Current Directions in Psychological Science, 28*(2), 127–133.